

# PENGARUH DAN DAMPAK STANDARISASI ORDE BARU DALAM ARENA SASTRA DI SUMATRA BARAT DI ERA REFORMASI

**Romi Zarman**

(Mahasiswa S2 Sejarah Universitas Andalas, Email: romi\_zarman@yahoo.co.id)

## **Abstract**

*Indonesian literature in West Sumatra in the New Order era was centralized in order to maintain uniformity of the New Order to preserve the power. Some writers in West Sumatra, including A.A. Navis and Darman Moenir, took a role as agents of the centrality and uniformity in offering a particular standard for the writers, literary critics, and literary history in West Sumatra. This paper examines how the influence and impact on the standardization of the literary critics, writers, and literary history in the area of West Sumatera in the Reformation era. This paper implicitly uses Bourdieu's sociological theory, using primary sources of essays, notes, articles, and other forms. This study reveals that there have been number of attempts aiming to deconstruct standarization designed by the previous regime. However, those attempts were widely seen as attempts to destabilize situation in this area.*

**Key Words:** *Standardization, New Order, the literary arena, West Sumatra.*

## **LATAR BELAKANG**

Mundurnya Moehammad Hatta dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1956 menandai dimulainya kediktatoran Soekarno dan politik Nasution di Sumatra Barat. Dialektika Minangkabau yang melahirkan pemimpin-pemimpin nasional generasi pertama mulai terbungkam dari tahun itu hingga kejatuhan diktator Soeharto pada bulan Mei 1998. Kritik tajam oleh PRRI/Permesta terhadap Jakarta pada bulan Februari 1958 dibungkam oleh Soekarno-Nasution dengan senjata, ribuan serdadu diterjunkan ke Sumatra Barat dan anak-anak Minangkabau yang demokratik diburu dan ditangkap. Suatu eksodus besar-besaran orang Minangkabau ke tanah rantau pasca pembungkaman itu berlangsung dengan efek traumatik nyaris tak tersembuhkan: anak-anak Minangkabau menyembunyikan identitas keminangkabaunya dan nama-nama mereka ditukar dengan nama-nama berbau Jawa. Inilah

genosida kebudayaan pertama di Indonesia pasca kemerdekaan Republik. Naiknya Jenderal Soeharto ke tampuk kekuasaan Republik, disusul kemudian dengan genosida kedua terhadap kebudayaan Minangkabau lewat undang-undang jawnisasi Nomor 5 Tahun 1979, membuat Minangkabau semakin tak tersembuhkan. Sistem Nagari sebagai basis utama demokrasi di Minangkabau dipaksa oleh Undang-Undang tahun 1979 itu agar diganti dengan sistem Desa berkarakter jawa Soeharto yang anti-demokrasi. Kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat dibungkam oleh diktator Soeharto. Sekolah-sekolah tradisional Minangkabau (lapau) sebagai basis kedua demokrasi di Minangkabau diawasi dengan ketat dan parlemen-parlemen tradisional (balai adat) dimatikan di bawah ancaman serdadu.

Di bawah rezim represif Orde Baru inilah segala sesuatunya di Sumatera Barat dipaksa tunduk ke dalam satu sistem yang serba sentralistik dan seragam,

otoriter dan anti-demokrasi, suatu kehendak yang bertentangan dengan kultur dasar Minangkabau: di Minangkabau segala sesuatunya sah untuk dipertanyakan dan tak ada tempat untuk anti-demokrasi. Standarisasi oleh rezim represif Orde Baru yang anti-demokrasi itu kemudian terbentuk dan menjalar kuat ke dalam arena sastra di Sumatra Barat, menghendaki keseragaman demi menjaga kekuasaan Orde Baru agar tetap berdiri kokoh dan berdaya tahan lama. Mereka yang pantas disebut sastrawan adalah mereka yang karya-karyanya dilegitimasi oleh Jakarta: Horison atau Kompas, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) atau Taman Ismail Marzuki (TIM). Mereka yang belum memperoleh legitimasi Jakarta dipandang sebagai pengarang kelas tiga dan belum berhak disebut sastrawan dan dinyatakan tidak pantas duduk bersama dengan para pengarang kelas satu yang di masa Orde Baru jamak disebut sastrawan nasional. Beberapa sastrawan di Sumatra Barat, seperti A.A. Navis dan Darman Moenir, berperan sebagai agen ideologis dan mendistribusikan serta menjaga standarisasi yang serba Jakarta sentris itu dari generasi ke generasi.

Paper ini mencoba menjawab satu pertanyaan: bagaimanakah pengaruh dan dampak atas standarisasi Orde Baru dalam arena sastra di Sumatra Barat pada era Reformasi?

## **STANDARISASI ORDE BARU**

Suatu benturan keras berwujud “perang kertas” antara pemeluk gagasan terbuka dan penderita penyakit ideologis warisan Orde Baru terjadi di Sumatra Barat dari minggu ketiga bulan Januari hingga Maret 2011, dipicu oleh tulisan Darman Moenir di surat kabar Haluan, 23 Januari 2011, berjudul “30 Tahun Terakhir Tak Ada Novel Bermutu dari Sumatera Barat, Novel Presiden Membawa Warna Baru”. Dalam esainya itu,

standarisasi dan kebermutuan karya sastra ditakar berdasarkan berhasil atau tidaknya pengarang dalam “menaklukkan” Jakarta sebagai pusat dalam arena sastra nasional. Mereka yang karya-karyanya belum menembus Horison atau Kompas, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) atau Taman Ismail Marzuki (TIM), dipandang sebagai pengarang kelas tiga dan belum berhak disebut sastrawan dan dinyatakan tidak pantas “duduk semeja” dengan para pengarang kelas satu yang di masa Orde Baru jamak disebut sastrawan nasional. Meskipun kemudian suatu apologi bermunculan di Sumatera Barat bahwa standarisasi itu bertujuan memotivasi pengarang muda dalam berkarya namun yang jelas standarisasi itu telah membuat jatuhnya korban diskriminasi dari pihak yang hendak masuk ke arena yang disebut sastra nasional itu.

Haris Effendi Tahar dan Gus tf Sakai di bawah rezim diktator Soeharto adalah korban diskriminasi atas standarisasi Orde Baru yang serba sentralistik itu. A.A. Navis adalah orang yang pertama kali mengamini (penulis tak menemukan suara kritis Navis dalam memandang standarisasi Orde Baru yang penindas itu) dan malah menumbuh-kembangkan standarisasi itu dalam arena sastra nasional di Sumatra Barat, dan kemudian didistribusikan dan dijaga dari generasi ke generasi oleh Darman Moenir. Dalam terminologi Bourdieu, Navis dan Darman adalah agen penjaga kekuasaan Orde Baru di Sumatra Barat dalam arena sastra. Kekuasaan Orde Baru yang serba sentralistik itu semakin langgeng ketika korban-korban diskriminasi itu bangkit dan justru mengamini penyeragaman yang dikehendaki oleh agen Orde Baru dengan berupaya “menaklukkan” Jakarta. Tatkala Jakarta berhasil “ditaklukan” oleh karya-karya Gus tf Sakai, misalnya, maka terjadilah peralihan labelisasi dari sebutan pengarang pop ke pengarang sastra, suatu sebutan yang di masa

1920-an paralel dengan sebutan pengarang pitjisan dan Balai Poestaka bentukan kolonial Belanda.

Tumbangnya rezim represif Orde Baru pada bulan Mei 1998 membawa angin segar dalam arena sastra di Sumatra Barat. Berbagai novel lahir dari penulis-penulis baru, penerbit tumbuh berupaya meruntuhkan dominasi Penerbit Gramedia Group, jaringan kapitalisme buku mendapatkan tandingan dengan sistem distribusi dari komunitas ke komunitas. Komunikasi dan akses kian terbuka, inilah kemudian yang disebut globalisasi itu, meruntuhkan dikotomi pusat dan daerah, lokal dan nasional serta internasional, suatu dasar politik identitas yang di masa Orde Baru berlaku sebagai pengontrol kebudayaan. Pengarang-pengarang “hibrid” di Sumatera Barat, yang lahir dari standarisasi Orde Baru yang penindas itu (dan sejauh penelusuran penulis, mereka tidak melakukan perlawanan apa-apa dan malah mengamini layaknya Navis) dan Reformasi yang serba terbuka, di antaranya, Agus Hernawan, Mohammad Isa Gautama, dan Sondri BS, menjadi panutan dalam mencari standarisasi bagi generasi pengarang yang lahir dan tumbuh di kampus-kampus semi-demokratik di Sumatra Barat, seperti Unand, UNP, dan IAIN Imam Bondjol.

Dewan Kesenian Sumatra Barat di bawah pimpinan Ivan Adilla merangsang tumbuhnya pengarang generasi baru Sumatra Barat dengan menyelenggarakan workshop kepenulisan pada bulan April 2005. Ragdi F Daye, Deddy Arsyah, dan Iggoy el Fitra, adalah sedikit nama dari sekian banyak alumni workshop kepenulisan itu yang kemudian intensif mendisiplinkan diri dalam menulis puisi dan cerpen tidak hanya di media-media cetak Sumatera namun juga Jawa. Pada tahun berikutnya, workshop itu kembali dilangsungkan oleh Dewan Kesenian Sumatra Barat di INS Kayutanam dengan peserta berbeda dari tahun sebelumnya. Terlebihlah

kemudian para alumni workshop 2006 itu yang tak kalah intensifnya dalam mendisiplinkan diri dalam menulis, di antaranya, Esha Tegar Putra dan Heru Joni Putra. Selepas itu, terjadi pergantian pengurus—Dewan Kesenian Sumatra Barat mulai memasuki masa suram, “penuh kongkalingkong”, demikian tulis Zelfeni Wimra, dan menampakkan kecondongan pada sebetulnya fasisme kebudayaan—dan tak ada lagi workshop kepenulisan bagi anak-anak muda Sumatera Barat.

Komunitas-komunitas sastra kemudian bermunculan dan tumbuh silih berganti di Sumatra Barat, seperti Komunitas Ilalalang Senja (digerakan oleh Iggoy el Fitra, dkk), Komunitas Daun (Yetti A.Ka, dkk), Rumah Kreatif Kandangpadati (Pinto Anugrah, dkk), Ruang Sempit (Arif Rizki, dkk), ruang diskusi sastra di komunitas Teater Imam Bondjol (Zelfeni Wimra, dkk), Diskusi Sastra Secangkir Kopi (Fadlillah dan mahasiswa/i penulis karya sastra), Komunitas Tubuh Jendela (Maira, dkk), dan lain-lain. Tak ditemukan spirit “pendewaan” terhadap sosok yang dituakan dalam komunitas-komunitas sastra itu mengindikasikan mulai bangkitnya dialektika Minangkabau yang dibungkam oleh diktator Soeharto sepanjang berkuasanya rezim represif Orde Baru. Komunitas-komunitas itu disinggahi oleh beragam orang dan diskusi-diskusi separoh intensif berlangsung hampir setiap minggu. Komunitas-komunitas itu tampak bergerak ke arah gagasan terbuka, demokratik dan menjaga keberagaman, hubungan berlangsung horisontal dan tidak vertikal.

Pada titik inilah kemudian terjadi benturan keras bersifat ideologis tatkala Darman Moenir dalam esainya itu (Haluan, 23 Januari 2011) menjadikan Dewan Kesenian Jakarta sebagai barometer dalam menentukan kebermutuan novel-novel dari Sumatra Barat. Nyatanya dari standarisasi yang diskriminatif itu disimpulkan

oleh Darman Moenir bahwa tak ada novel bermutu dari Sumatera Barat sejak tiga puluh tahun terakhir. Pada tahun 1980, novel Bako karya Darman Moenir keluar sebagai pemenang utama Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta. Suatu esai berstandar Orde Baru yang diskriminatif itu kemudian dipublikasikan oleh Darman Moenir di Haluan pada tanggal 23 Januari 2011, berjudul “30 Tahun Terakhir Tak Ada Novel Bermutu dari Sumatera Barat, Novel Presiden Membawa Warna Baru”. Inilah rentang waktu tiga puluh tahun yang dimaksud oleh Darman Moenir itu: 1981-2010. Tak ada penulis dari Sumatera Barat yang berhasil memenangkan Sayembara Menulis Novel DKJ dari tahun 1981 hingga 2010 menjadi indikator bagi Darman Moenir dalam memandang kebermampuan karya sastra dari Sumatera Barat. Karena itu, tatkala novel Presiden Wisran Hadi keluar sebagai salah satu pemenang Sayembara Menulis Novel DKJ 2010, maka Darman Moenir serta-merta mengklaim telah lahir novel bermutu dari Sumatera Barat setelah karya-karya penulis Sumbar mengalami kekosongan mutu sepanjang tiga puluh tahun terakhir.

### **PENGARUH DAN DAMPAK STANDARISASI ORDE BARU TERHADAP KRITIKUS SASTRA**

Paska meninggalnya H.B. Jassin di Jakarta pada tahun 2000, wacana tentang kelangkaan kritikus sastra mulai menggeliat dan menjalar ke Sumatera dan pedalaman Jawa, Kalimantan dan Sulawesi serta Bali. Standarisasi Orde Baru yang diskriminatif itu masih saja menjadi acuan oleh Pamusuk Eneste meskipun Orde Baru yang penindas itu telah berganti Reformasi. Dalam suatu diskusi lepas dengan Ivan Adilla di kampus semi-demokratik Fakultas Sastra Universitas Andalas pada tahun 2005, Ivan mengemukakan

kepada penulis bahwa Pamusuk Eneste menunjuk dirinya untuk menulis buku A.A. Navis: Karya dan Dunianya atas rekomendasi langsung dari A.A. Navis. Di era Reformasi yang serba terbuka, sistem C.V. (curriculum vitae) tanpa foto (prestasi-prestasi akademik dan intensitasnya) menurut penulis lebih tepat dijadikan standarisasi, beresiko bersih dari pengaruh standarisasi Orde Baru dan dapat diakses dan diawasi oleh siapa saja. Pada Hari Minggu tanggal 20 Februari 2011, redaktur sastra Haluan (Nasrul Azwar) memuat suatu pengantar redaksi bahwa polemik sastra yang sedang berlangsung di Haluan dikembangkan ke wacana mengenai kelangkaan kritikus sastra di Sumatera Barat. Wacana yang tidak hanya didistribusikan oleh Haluan namun juga oleh kalangan sastrawan itu berimplikasi standarisasi Orde Baru yang diskriminatif itu. Padahal, dari pertengahan 1990-an hingga hari ini ada satu orang kritikus sastra di Sumatera Barat yang tekun menulis kritik sastra di media cetak berupa esai, artikel, review buku, dan membentangkan paper di berbagai forum, namun dilupakan dan dipandang artifisial belaka, yakni bernama Fadlillah Malin Sutan Kayo. Inilah dia: korban diskriminasi atas penyakit ideologis warisan diktator Soeharto yang penindas itu, yang terus dipertahankan di Sumatera Barat dalam era Reformasi. Mereka yang pantas disebut kritikus sastra oleh para penderita penyakit ideologis tanpa sadar itu adalah mereka yang dilahirkan oleh standarisasi Orde Baru, rekomendasi tanpa C.V. dari seseorang yang “didewakan” seperti Navis, dan harus berhasil “menaklukan” Jakarta.

### **PENGARUH DAN DAMPAK STANDARISASI ORDE BARU TERHADAP PENGARANG GENERASI BARU**

Pengarang generasi baru di Sumatera Barat, seperti Ragdi f Daye, Deddy Arsyah, Iggoy el Fitra,

Esha Tegar Putra, Heru Joni Putra, dan lain-lain, sebetulnya tanpa sadar ikut menjaga dan merawat standarisasi Orde Baru di era Reformasi dengan berlomba-lomba “menaklukkan” Jakarta— termasuk penulis dalam hal ini (sebagai orang yang pernah menulis karya sastra), karena itu artikel ini bagi penulis (dan mungkin juga bagi pengarang segenerasi di Sumatera Barat) adalah otokritik penting. Ruang puisi Kompas dan Sastra Koran Tempo, yang berhabitus neo-lib Utan Kayu/Salihara, menjadi target utama taklukkan dan meminggirkan halaman sastra surat kabar terbitan Sumatera Barat ke strata paling bawah. Kuasa dikotomi pusat dan daerah, lokal dan nasional serta internasional, terlestarikan oleh pengarang generasi baru Sumatera Barat ini. Sejumlah penghargaan kepada generasi baru ini oleh sebagian pengajar sastra di kampus semi-demokratik seperti Unand, berbentuk labelisasi menyematkan: ‘sastrawan nasional’ dan ‘sastrawan internasional’, membuka ruang baru bagi terciptanya “patologi sosial” paling mengerikan awal abad ke-21. “Penyakit-penyakit sosial” itu berbentuk narsisme, lebay, dan menderita penyakit “rasa memiliki” yang berlebihan dan merasa paling berjasa dalam memberikan kontribusi terhadap institusi dan kerja kebudayaan di Sumatera Barat, sehingga suatu sikap yang mengarah ke vandalisme mulai tampak dan mengancam: ketika pengarang yang mahasiswa itu lalai dalam memenuhi tuntutan akademiknya maka ia merasa berhak memperoleh dispensasi meskipun itu berisiko melabrak rambu-rambu akademik yang semestinya dipatuhi.

Delusi kesastraan menimpa beberapa pengarang generasi baru Sumatera Barat itu. Pada 2012, beberapa pengarang muda itu melangsungkan suatu event bernama Padang Literary Biennale 2012 di tengah permukiman

padat penduduk di Jalan Kandangpadati, Kecamatan Kuranji, Padang, dan mengundang sejumlah penyair Sumbar terpilih untuk membacakan puisi-puisinya di atas panggung, dan masyarakat sekitar hanya jadi pekerja dan penonton belaka. Sejarah sastra tulis Sumatera Barat yang terentang panjang dan tak putus dalam melahirkan pengarang pada setiap zaman, dari periode kolonialisme Belanda hingga Reformasi, jelas menolak event sastra berbentuk panggung untuk para pengarang. Tradisi tulis itu mestinya menyebar, ke sekolah-sekolah dan perempatan jalan, misalnya, dan memformulasikannya menjadi sebetulnya benteng bagi anak-anak muda Sumatera Barat dari gempuran narkoba dan penyakit-penyakit pikiran yang mendesak untuk segera disembuhkan. Premis ‘sastra adalah sastra’ (atau ‘sastra untuk sastra?’) sudah saatnya disingkirkan oleh pengarang di Sumatera Barat dan bersinergi keluar diri dalam grand design kebudayaan.

Di tengah keputungan “penyakit-penyakit sosial” itulah suatu tindakan diskriminasi kembali menimpa pengarang muda Sumatera Barat bernama Heru Joni Putra. Pada 24 Maret 2013, berkumpul para sastrawan dan budayawan, juga pejabat negara dan tokoh-tokoh masyarakat di Bukittinggi, dideklarasikan bersama-sama apa yang kemudian dikenal sebagai Hari Sastra Indonesia. Surat undangan dilayangkan oleh panitia kepada pengarang-pengarang segenerasi Heru untuk turut menghadiri deklarasi Hari Sastra Indonesia namun tidak untuk pengarang Heru Joni Putra. Kekritisan Heru Joni Putra dalam bersuara di arena sastra di Sumatera Barat terhadap salah seorang penggagas acara menjadi penyebab utama, khas bergaya Orde Baru: diktator! Anti-demokrasi! Terbiar tanpa perlawanan dan advokasi pikiran oleh mereka

yang berarena sastra di Sumatra Barat, Heru Joni Putra kemudian menulis suatu esai tajam di surat kabar Padang Ekspres: “siapa saja yang [hendak] masuk [dalam acara-acara] Sastrawan Indonesia [maka sebaiknya perihal undangan] tidak ditentukan oleh satu kelompok saja”.

## **PENGARUH DAN DAMPAK ATAS STANDARISASI ORDE BARU TERHADAP SEJARAH**

Suatu politik kolonial di Nederlandsch-Indie menempatkan buku-buku sastra keluaran non-Balai Poestaka sebagai “bacaan liar” yang mesti diberantas, pitjisan atau ‘najis’ dalam istilah Darman Moenir. Para penulisnya menurut standarisasi Orde Baru yang penindas itu jelas tak layak disebut sebagai sastrawan, karena itu Hari Sastra Indonesia yang diproklamirkan di Bukittinggi pada 24 Maret 2013 didasarkan atas hari kelahiran sastrawan keluaran Balai Poestaka bernama Abdoel Moeis. Kolonialisme Belanda di Sumatera Barat digantikan oleh rezim represif Orde Baru.

Naskah roman Salah Asoehan yang aslinya ditulis oleh Abdoel Moeis itu mengalami perombakan hebat selama setahun penuh di tangan editor Balai Poestaka, relasi penjajah dan terjajah dikonstruksi atas dasar ideologi kekuasaan kolonial Belanda. Anak-anak muda Minangkabau dari akhir 1920-an direpresentasikan lewat tokoh Hanafi berkarakter hibrid, penuh ambivalensi, seakan-akan anak-anak Minangkabau 1920-an memang berkarakter demikian. Roman distorsi sejarah ini didistribusikan ke seluruh taman bacaan bentukan kolonial dan disebarluaskan di Sumatra’s Westkust dalam bentuk tonil oleh murid-murid Zuster School (Padang) pada awal 1930-an, salah seorang dari murid itu bernama Siti Aksar (kelak menjadi istri pertama Dr. M. Djamil yang terkenal itu), memerankan tokoh Corry dan

menerima karakter Hanafi sebagai representasi yang seolah betul-betul nyata. Distorsi sejarah ini dijaga dan dirawat dengan baik hingga hari ini oleh sastrawan Indonesia berstandar Orde Baru dengan memilih hari kelahiran Moeis sebagai Hari Sastra Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Standarisasi Orde Baru dalam arena sastra di Sumatra Barat bersifat sentralistik dan menghendaki keseragaman demi menjaga kekuasaan Orde Baru agar tetap berdiri kokoh dan berdaya tahan lama. Beberapa sastrawan di Sumatra barat, seperti A.A. Navis dan Darman Moenir, berperan sebagai agen dalam menjaga dan mendistribusikan standarisasi yang diskriminatif itu dari generasi ke generasi dan menjalar kuat hingga era Reformasi di Sumatra Barat, berdampak luas dan mengerikan pada sebagian pengarang generasi baru dengan mengidap berbagai “penyakit sosial” paling mematikan awal abad ke-21. Suatu upaya untuk menyembuhkan penyakit ideologis warisan Orde Baru dalam arena sastra di Sumatra Barat dilakukan pertama kali oleh Taman Budaya Sumatra Barat lewat suatu forum bernama Dialog Sastra di Gedung Galeri Seni Rupa Taman Budaya Sumbar pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013. Darman Moenir, agen dan penjaga standarisasi Orde Baru dalam arena sastra di Sumatra Barat itu, menyatakan dengan tegas dalam forum itu bahwa beberapa orang pemeluk gagasan terbuka di Sumatra Barat (yang anti terhadap standarisasi Orde Baru yang deskriminatif itu) berupaya membangun eksistensi diri dengan mengaitngaitkan antara dirinya (Darman Moenir) dan dosa Orde Baru. Karena itu, upaya-upaya untuk mengatasi pengaruh dan dampak standarisasi

Orde Baru yang diskriminatif itu dalam arena sastra di Sumatra Barat era Reformasi bagi para penderita penyakit ideologis warisan Orde Baru adalah suatu tindakan politik, tendensius, dan dipandang dapat merusak iklim kesastraan di Sumatra Barat. Pemaknaan yang anti-dialog seperti itu mesti diberantas.

## DAFTAR PUSTAKA

Asnan, Gusti. "Antara Lapau dan Balai (Adat): Dinamika Demokrasi di Sumatra Barat". Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta, 8-11 Oktober 2013.

Asnan, Gusti, dkk. *DR. Mohammad Djamil: Berjuang untuk Kemerdekaan dan Kemanusiaan*. Padang: Lembaga Telaah dan Implementasi Gagasan Alternatif, 2006..

Alwi, Nelson. "Kelangkaan Kritikus Sastra dan Peneliti Sastra". Dalam *Haluan*. Padang, 20 Februari 2011.

———. "Meragukan Hari Sastra Indonesia". Dalam *Padang Ekspres*. Padang, 31 Maret 2013.

Chairiyah, Sri Zul. *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatra Barat : Dampak Penerapan UU no. 5 tahun 1979 Tentang Sistim Pemerintahan Desa*. Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat, 2008.

Delfia, Elly. "Polemik Sastra Sumatra Barat: Bahasa Cermin Kebermutuan Karya Sastra dan Pengarang". dalam *Haluan*. Padang, 6 Februari 2011.

Delvy Kurnia Alamsyah, "Arogansi Sastra Kanon (Respon Terhadap Tulisan Darman Moenir)". Dalam *Haluan*. Padang, 30 Januari 2011.

Didnata, Andhika. "Sastrawan yang Baik Sama Dengan Kritikus yang Baik". dalam *Haluan*. Padang, 20 Maret 2011.

Elfaldi (ed.). *Puisi dalam Analisis*. Padang: Yayasan Taraju dan kelompok Kajian Poetika Unand, 1995.

Elfaldi & Fadlillah. *Metamorfosa*. Padang: Pustaka Pilar Utama, 1997.

"Empat Pemenang Unggulan Sayembara Menulis Novel DKJ 2010", disiarkan secara online di website Dewan Kesenian Jakarta: <http://www.dkj.or.id/news/sastra/pertanggungjawaban-dewan-juri-sayembara-menulis-novel-dewan-kesenian-jakarta-2010> (diakses oleh penulis pada 23 Oktober 2013).

Fadlillah. *Kritik di Tengah Budaya Anti-Kritik dan Ruang-Ruang Kosong Metafora*. Padang: Andalas University Press, 2003.

Foulcher, Keith. "Biography, history and the Indonesian novel Reading Salah Asuhan". Dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI)*. 161-2/3, 2005:247-268.

Moenir, Darman, "30 Tahun Terakhir Tak Ada Novel Bermutu dari Sumatra Barat, Novel Persiden Membawa Warna Baru". dalam *Haluan*. Padang, 23 Januari 2011.

———. "Menulis Novel Kerja Kreatif". Dalam *Haluan*. Padang, 27 Februari 2011.

"Polemik Sastra Sumatra Barat Menjalar ke Facebook", Dalam *Haluan*. Padang, 27 Maret 2011.

Putra, Esha Tegar. "Terapi Autisme Kesastraan (Respon atas Tulisan Romi Zarman)". dalam *Haluan*. Padang, 6 Maret 2011.

Putra, Heru Joni. "Sebuah Pembelaan untuk Harry Potter". Dalam *Padang Ekspres*. Padang, 12 April 2012.

- . “Beban Berat Kritikus Sastra”. Dalam *Haluan*. Padang, 13 Maret 2011
- . “Meragukan Hari Sastra Indonesia”. Dalam *Padang Ekspres*. Padang, 31 Maret 2013
- Subhan, Muhammad. “Biarkan Pembaca yang Menjadi Hakim (Tanggapan atas Tulisan Darman Moenir)”. Dalam *Haluan*. Padang, 13 Februari 2011.
- Syafril. *Wisran Hadi, Bumi Teater dan Teater yang Mengindonesia*. Jakarta-Padang: FTI Press, 2010.
- Sudarmoko, “Polemik Sastra Sumatra Barat: Sedikit Gambaran Sastra Indonesia di Sumatra Barat”. Dalam *Haluan*. Padang, 6 Februari 2011.
- Tasai, Amran & Djamari. eds. *Pandangan Sastrawan A.A. Navis dan Tanggapan Kritikus Terhadap Karyanya*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
- Wimra, Zelfeni. “Dilarang Berladang di Punggung Seniman”. Dalam *Padang Ekspres*. Padang, 8 Januari 2008.
- Yusra, Abrar. eds. *Tokoh yang Berhati Rakyat: Biografi Harun Zain*. Jakarta: Gebu Minang, 1997.
- Zarman, Romi. “Autisme Kesastraan”. Dalam *Haluan*. Padang, 27 Februari 2011.